

### BAB III

## KONDISI POLITIK INDONESIA

### A. Gerakan dan Aksi-aksi Komunis di Indonesia

Komunisme adalah sebuah faham atau teori tentang sistem kehidupan sosial manusia di dasarkan atas "Milik bersama". Benih faham ini sebenarnya sudah ada sejak jaman Yunani kuno. Menurut Filosof Plato, secara natural semua manusia adalah bebas dan sama derajatnya.

Dalam sejarah perkembangan komunisme. Menjadi sebuah Doktrin mengenai gerakan revolusioner yang bertujuan menghapuskan kapitalisme, kemudian membangun suatu masyarakat dimana secara sosial semua produksi dan distribusi menjadi milik bersama. Kehidupan ekonomi direncanakan dan dikontrol secara bersama-sama dan distribusi pendapatan di sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anggota masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran ideologis, faham komunisme lebih di kenal dari salah seorang filsafat beken abad-19 yaitu *Karl Marx* (1818-1883). ia hidup di jaman kapitalisme yang eksploitatif dan *inhuman*, dimana kaum buruh upah hidup dalam kondisi tidak manusiawi karena keuntungan kapitalis sebesar-besarnya.

(Soemarno Dipodisastro, 1995 : 2).

Kemudian filsafat **Marx** dianut oleh **Lenin**, dan dijadikan sebagai sebuah dogma ideologi untuk melegitimasi kan pragmatisme kekuasaan, absolut-totaliter pemimpin partai komunis Uni Sovyet dan bukan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil sejahtera sebagaimana yang menjadi klaim komunisme . Tetapi **Lenin** tidak yakin bahwa kesadaran revolusi itu akan muncul dengan sendirinya dalam kelas buruh proletariat.

Dari telaah singkat diatas, menjadi jelaslah bagi kita bahwa ideologi komunisme-Marxisme-Leninisme tidak lebih dari sekedar alat untuk melegitimasi monopoli kekuasaan dan pragmatisme kekuasaan para pemimpin partai komunis dalam negara diktator proletariat Uni Sovyet. (Soemarno Dipodisastro, 1995 : 3).

Ideologi komunis disebar luaskan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1913 pada zaman Hindia Belanda. Dialah *H.J.F.M.Sneevliet*. Medan yang paling pertama ia masuki untuk menebarkan benih ideologi komunisme **Marxisme-Leninisme** adalah Pers. Dengan didirikan organisasi *Marxis pertama* di Asia Tenggara yang bernama **ISDV (Indische Social Democratische Vereniging)** pada tahun 1914 oleh **Sneevliet**, **H.W. Dekker** dan **Bergsma**, maka mereka berkuasa mendirikan pers propaganda ideologi komunis seperti suara merdeka dan suara Rakyat. Melalui Pers, **Sneevliet** dkk berhasil merekrut wartawan untuk menjadi kader komunis.

Kemudian pada saat Semaun dan Darsono berhasil dihubungi ISDV. Kendatipun kedua tokoh itu masih berada dalam Serikat Islam oleh ajaran komunisme . Partai ini secara resmi didirikan pada tanggal 23 Mei 1920 dengan dipimpin oleh Semaun dan Darsono, masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua, berpusat di Semarang. Setelah ditegakkan dan disiplin partai dalam tubuh Serikat Islam, Akhirnya pada tahun 1923 Samaun dan kawan-kawannya keluar dari Serikat Islam. Pertentangan antara dua kubu antara Serikat Islam putih dan Serikat Islam merah yang selama ini dapat ditutupi akhirnya tak terbendung lagi setelah diadakannya kongres PKI pertama di Semarang pada tanggal 24-25 Desember 1921 ini dapat dimaklumi, mengingat sejak 24 Desember 1920. PKI berberafikasi dengan Kpmunis Internasional yang anti pan- Islamisme. (Rusli Karim, 1993 : 26).

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunis atau PKI merupakan salah satu dari sekian terminologi terpopuler yang pernah mengharu biru alam politik Indonesia dalam kurun waktu cukup panjang. Hampir tidak ada kelompok atau bagian dari masyarakat yang tidak mengenal atau mendengar tentang PKI dengan sepak terjangnya dalam berbagai momen atau peristiwa bersejarah yang patut mendapat perhatian serta keprihatinan khusus. Berbeda dengan catatan sejarah agung lainnya yang mesti dicermati oleh komponen masyarakat guna diambil hikmah dan semangat dibaliknya, sejarah PKI menggoreskan luka hampir tak terhapuskan dalam sejarah Bangsa. PKI adalah bagian hitam dari perjalanan republik yang di satu sisi harus

dilupakan dari memori bangsa namun di sisi lain harus dikenang agar generasi berikutnya, yang notabene tidak mengalami langsung peristiwa sejarahnya, lebih hati-hati dan waspada segala kemungkinan kembalinya ideologi anti Tuhan ini di Indonesia.

Harus dihapuskan dari catatan sejarah itu tiada lain maksudnya berangkat dari kengerian dan rasa traumatik bangsa apabila mengingat dan mengenang kembali kebengisan dan kekejaman PKI yang dengan sepak terjang dan perilaku politik menghalalkan segala jalan dan cara untuk mencapai tujuan politiknya. Sementara urgensi penganangan kembali peristiwa-peristiwa sejarah berdarah yang didalangi oleh tokoh-tokoh PKI juga menyiratkan tekad dan semangat seluruh warga bangsa untuk menendang jauh-jauh segala hal yang berbau komunisme dari bumi nusantara. Oleh karena itu bab berikut akan menjelaskan secara historis maupun diakronis berbagai hal yang berkaitan dengan komunisme dalam rentang waktu dari 1960-1966. Periode ini dipilih dengan pertimbangan bahwa rentang enam tahun menjelang dibubarkan dan dilarangnya PKI beserta segenap organisasi *underbouw-nya* merupakan masa-masa rawan di mana HMI menghadapi ancaman dan bayangan pembubaran oleh kekuatan-kekuatan komunisme.

Sebagaimana kita ketahui bahwa partai komunis Indonesia (PKI) didirikan pada hari Minggu, 23 Mei 1920. (Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 17).

Kemudian Partai tersebut secara resmi di akhiri hak hidupnya dengan dinyatakan

sebagai Organisasi Terlarang (OT) pada tanggal 12 Maret 1966, akibat petualangannya dalam Gerakan G 30 S 1965. Kisah petualangan PKI yang sering mengganggu dan berusaha merubah Pemerintahan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD '45 perlu diungkapkan agar masyarakat luas dapat menilai kejahatan yang dilakukannya.

PKI mendapatkan pengikut dan perhatian luas dari masyarakat pada tahun-tahun keberadaannya tidak lepas dari agitasi dan propaganda yang dilakukan para pemimpinnya. Salah satu dari pemimpin PKI yang amat terkenal adalah D.N. Aidit. Dengan dibantu beberapa kawan karibnya, Aidit dapat mengontrol popularitas PKI dengan propaganda dan agitasi terhadap rakyat itu diawali tahun 1951 ketika Aidit yang didukung oleh M.H.Lukman dan Nyoto berhasil memenangkan kursi di sidang Pleno CC PKI. ( **Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 19**).

Kemudian sebagai kelompok muda yang berambisi besar maka Aidit dan kawan-kawannya mencoba membenahi PKI yang telah porak poranda akibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.

Setelah berhasil menguasai Central Committe (CC) PKI, maka Aidit mencanangkan program baru sebagai *jalan baru* untuk Republik Indonesia yang pernah diajukan Muso. Strategi baru itu mengisyaratkan bahwa PKI menempuh atau menjalankan strategi kanan yang berarti menjalankan strategi jalan damai dan perundingan melalui usaha mengkompromikan masalah di tubuh Badan Perwakilan.

Situasi pada tahun 1954 memerlukan seorang pemimpin PKI untuk dapat memenangkan kembali kemungkinan menguasai Lembaga perwakilan. Yang dapat dicatat dari upaya pemenangan Lembaga Perwakilan itu adalah dihasilkannya strategi Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) dan pokok-pokoknya meliputi :

1. Perjuangan gerilya di desa-desa dengan kaum tani sebagai intinya.
2. Gerakan Revolusioner di kota-kota oleh kaum buruh, terutama buruh transportasi.
3. Pekerjaan Partai di kalangan kekuatan bersenjata.

Strategi ini mengisyaratkan bahwa PKI menempuh dua jalan untuk mencapai tujuannya. Pertama jalan *legal*, yang merupakan penggabungan antara pokok-pokok pertama dengan pokok-pokok kedua. Jalan legal ini sering juga disebut dengan jalan damai. Kedua, jalan *illegal* yang menunjukkan maksud pokok-pokok ketiga.

Untuk melaksanakan strategi di atas maka PKI memerlukan suatu corak pemimpin yang dapat bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

Demikianlah dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) dibawah kepemimpinan DN. Aidit, PKI berhasil masuk dalam empat besar di samping Masyumi, NU dan PNI. PKI melakukan metamorfosa dari partai kader ke partai massa sebagai usaha mempengaruhi dan memperluas dukungan di kalangan

rakyat dan mempertegas usaha menyusup ke dalam tubuh kekuatan angkatan bersenjata (ABRI).

Memahami perubahan taktik dari partai kader ke partai massa dan mencari dukungan lebih luas dalam masa kepemimpinan Aidit, dapat dilihat dari beberapa segi. *Pertama* merubah bentuk Partai, apalagi partai komunis selalu mengidentikkan cita-citanya merebut kekuasaan negara melalui slogan "Pelopor Kelas Proletar dari Pemimpin Perjuangan pembebasan Rakyat" merupakan suatu kesalahan. (Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 20-21).

*Kedua*, sistem sosial memaksa pemimpin PKI memilih jalan di luar ketentuan dasar Marxisme, Leninisme tentang bentuk Partai yang harus ditegakkan. Menurut Marxisme, PKI harus ditegakkan pada organisasi modern berdasarkan kepentingan (sesuai dengan kondisi dan stratifikasi masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi). Akan tetapi dalam kenyataannya PKI memilih menegakkan partai yang bertentangan dalam masyarakat. ini mengakibatkan PKI menerima prinsip dukungan tanpa kejelasan tatanan organisasinya. *Ketiga*, PKI sebagai suatu organisasi telah diklaim sebagai hukum besi dari oligarki (*Iron Law of Oligarchy*). (Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 22).

Demikianlah PKI memasuki dekade 60-an kembali mempercepat usaha menguatkan dukungan dari masyarakat luas. Kesulitannya adalah karena massa (rakyat) terpengaruh oleh kharisma kepemimpinan Soekarno. ini terpaksa PKI

menerima kenyataan yang bertentangan dengan usaha pembuktian pelaksanaan MKTBP.

Demikianlah konsepsi strategi Aidit ini diterima secara aklamasi tetapi untuk bentuk yang ketiga yaitu bekerja di kalangan ABRI, Kongres memutuskan untuk dirahasiakan sesuai sifat kerahasiaannya maka kemudian oleh sidang pleno Polit Biro CC PKI diputuskan mendelegasikan bentuk perjuangan yang ketiga. Dari sini dapat diketahui bagaimana pimpinan biro khusus pusat PKI hanya bertanggungjawab dan berada langsung dibawah ketua CC PKI D.N. Aidit tanpa diketahui oleh banyak anggota PKI tingkat pimpinan lainnya (**Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 60**).

Perkembangan pada tahun-tahun 1960-an makin meningkat terutama pada tahun 1963/1964 (pada masa konfrontasi dengan Malaysia), sehingga untuk menangani pembinaan atau mengembangkan pengaruh partai dalam tubuh ABRI oleh pimpinan Partai dirasa perlunya kekhususan pengurusan dan pengorganisasian. Sejalan tingkat strategi **ofensif revolusioner** PKI pada bulan september 1964 dengan instruksi ketua PKI D.N. Aidit, secara resmi dibentuklah Biro Khusus Central oleh Kamaruzzaman alias Syam sebagai kepalanya. Pembentukan badan ini didasarkan atas pertimbangan atau tujuan mengorganisasikan anggota ABRI yang menjadi anggota PKI, untuk menyusun kekuatan di tubuh ABRI. Dengan kekuatan ini PKI dapat mendorong atau merubah kekuatan secara nasional.(**Direktorat Khusus Lemhanas, 1989 : 66**).

Upaya PKI dalam menciptakan situasi ofensif revolusioner adalah dengan memanipulasi pidato-pidato kenegaraan Presiden Soekarno sebagai Mandataris MPRS/ Preside seumur hidup/Pangti ABRI/PBR, setelah berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pidato-pidato yang dimanipulasi oleh PKI adalah sebagai berikut

**a. Tahun 1960 "Jalannya Revolusi Kita" (JAREK).**

Berisi komando dari pimpinan Negara (Revolusi) agar seluruh rakyat dan aparat pemerintrah melakukan Manipol Usdek (Manifesto Politik, UUD '45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Sebagai konsepsi Nasional (GBHN), PKI memanfaatkan isi pidato ini dengan memasukkan ide-idenya yang terkandung dalam MIRI ke dalam Manipol.

**b. Tahun 1961 "Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional" (RESOPIM),**  
untuk merealisasikan konsep politik demokrasi terpimpin, PKI memanfaatkan isi pidato ini agar situasi, politik semakin bergerak ke arah " kiri " .

**c. Tahun 1962 "Tahun kemenangan (TAKEM)".** PKI memanfaatkan pidato ini agar bangsa Indonesia semakin mendekat ke blok timur.

**d. Tahun 1963 "Genta Suara Revolusi Indonesia (GESURI)"**

PKI juga memanfaatkan isi pidato presiden ini agar bangsa Indonesia bersikap konfrontatif terhadap negara-negara barat dan lainnya yang dianggap sekutu negara Barat.

e. Tahun 1964. " Tahun vivere Pricoloso ( TAVIP)".

PKI memanfaatkan isi pidato ini agar bangsa Indonesia memiliki sikap makin revolusioner.

f. Tahun 1965 " Tahun Berdiri di Atas Kaki Sendiri" (TAKARI).

PKI memanfaatkan isi pidato ini yang pada dasarnya bernada rangkuman tema-tema pidato Presiden Soekarno sejak tahun 1960 agar bangsa Indonesia menentang blok Barat dan mendekatkan diri ke blok timur melalui poros- Jakarta- Pnom Penh- Peking- Pyong Yang, serta makin revolusioner. Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1965 atas permintaan Presiden Soekarno disusun oleh Nyoto. ( **Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994 : 39**).

Tentang tugas-tugas Biro Khusus PKI (CC PKI) seperti dijelaskan dapat diungkapkan secara gamblang setelah gagalnya pemberontakan G.30 S. PKI. Adapaun tugas-tugas biro tersebut adalah

1. Mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI guna menyusun potensi dan kekuatan bersenjata. Mengingat tugas ini memerlukan waktu yang cukup lama serta ketekunan usaha serta hasilnya tidak selalu

memuaskan, maka sekurang-kurangnya diusahakan untuk mendapatkan simpatisan yang tidak memusuhi PKI.

2. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan disumpah dapat membina para anggota ABRI lainnya. Dalam rangka mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis di lingkungan ABRI dapat ditempuh dengan cara-cara melalui penyelenggaraan diskusi-diskusi yang teratur, sampai mereka menjadi pengikut PKI yang dapat dipercaya.
3. Mencatat anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi anggota PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bagi kepentingannya.

Ketiga program besar PKI di atas dilakukan dengan cara-cara

#### 1. Penanaman sel-sel.

Apabila sudah berhasil mendapatkan seorang anggota ABRI, maka orang tersebut dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya secara teori maupun praktek. Jika hal itu sudah dianggap cukup, orang itu kemudian diberi pekerjaan menurut tugas, kemampuan dan kesanggupannya. Dengan demikian anggota ABRI itu telah dianggap sel partai ditempatnya bekerja.

#### 2. Penanaman simpatisan Partai.

Orang-orang atau anggota ABRI yang dihubungi oleh petugas partai tetapi belum dapat ditarik menjadi anggota Partai orang tersebut sudah diberi tugas ringan. Orang semacam ini diklasifikasikan sebagai simpatisan partai. Tugas

simpatisan partai yang pertama adalah mempelajari politik dan pengetahuan mengenai kepartaian. Caranya dengan diberi brosur-brosur partai dan diajak bertukar pikiran mengenai politik praktis partai dan tentang teori elementer Marxisme leninisme.

3. Mempertajam *gap* antara atasan dan bawahan.

Antara bawahan dan atasan adakalanya terdapat perbedaan kondisi sosial dan ekonominya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini selalui dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jalan mempertajam dan meluaskan rasa perbedaan tersebut. Maksudnya adalah dengan makin tajam dan makin meluasnya perbedaan tersebut maka ABRI akan semakin melemah.

4. Memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh untuk kepentingan perjuangan partai. Jika di dalam tubuh ABRI telah terdapat anggota-anggota PKI maka anggota-anggota itu dapat digunakan untuk kepentingan perjuangan partai. Misalnya, dapat digunakan dalam gerakan pengumpulan uang untuk kongres atau dapat juga dijadikan saluran untuk informasi mengenai aktivitas ABRI.

Biro khusus Central ini dipimpin oleh Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah alias Sjam dan sebagai kepala dan orang pertama langsung bertanggung jawab kepada ketua CC PKI D.N. Aidit. (Sekretariat Negara R . I, 1994 : 40 ).

1. Pono alias supono Marsudidjojo yang menjadi wakil kepala I dan orang kedua yang merangkap kepala bagian organisasi yang langsung bertanggung jawab kepada Sjam.

menduduki jabatan penting, antara lain Mayjen TNI Pranoto Reksosamodo, Brigjen TNI Soepardjo, Kolonel Inf. A. Latief dan Letkol Inf. Untung.

## **2. Ke dalam TNI-Angkatan Laut**

Proses penyusupan PKI ke dalam tubuh TNI-AL tidak berbeda dengan apa yang dilaksanakan terhadap ABRI pada umumnya.

Di samping itu, PKI juga berhasil membina Letkol Laut Ranu Sunardi melalui Rustomo, ketua Biro Khusus Daerah Jawa Timur. Sehubungan kepindahan dinas ke Jakarta, Letkol Laut Ranu Sunardi kemudian dibina Komodor Laut Soeradi, dan kawan-kawan. Namun, PKI tidak berhasil mempengaruhi pucuk pimpinan TNI-AL.

## **3. Ke dalam TNI- Angkatan Udara**

Rachmat Kusumubroto, seorang tokoh PKI pada tahun 1946 kembali ke Indonesia dari Negeri Belanda dan bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen. waktu itu Kementerian dipegang oleh Mr. Amir Syarifuddin. Dalam upaya pengembangan selanjutnya berhasil menghubungi Komodor Udara Siswadi yang waktu itu menjabat sebagai intelijen Markas Besar Angkatan Udara (MBAU).

Di antara perwira-perwira TNI-AU lainnya yang berhasil di bina PKI adalah Letkol Udara Heru Atmojo dan Mayor Udara Sujono. Letkol Udara Heru Atmodjo, berhasil menduduki jabatan penting di TNI-AU menggantikan Kolonel Udara Sudiono sebagai Kabag intel MBAU. PKI berhasil mengembangkan

pengaruhnya atas sikap-sikap Men/Pangau Laksdy Udara Omar Dhani yang juga Omulai dihubungi oleh Bono melalui Letkol pembina PKI tersebut, menyebabkan sikap Men/ Pangau Laksdya Udara Omar Dhani bernada mengutungkan PKI.

#### 4. Ke dalam Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) /Kepolisian Negara RI (POLRI)

Pembinaan PKI terhadap Angkatan Kepolisian Negara RI dilakukan oleh Biro Khusus Central, yaitu Pono dan Hamim diantara sekian banyak perwira Kepolisian yang berhasil di bina oleh Biro khusus PKI adalah Brigjen Pol. S. Soetarto, Dia juga telah berhasil menduduki beberapa jabatan penting dilingkungan Kepolisian dan kemudian berhasil pula menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), serta berhasil pula menduduki Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Jadi sejak semula Brigjen Pol. S. Soetarto tertarik kepada faham *Marxisme-Leninisme*.

Upaya PKI mempengaruhi dan melemahkan ABRI yang dilakukan oleh petugas-petugas Biro Khusus PKI telah berhasil mempengaruhi sejumlah perwira ABRI sehingga menjadi simpatisan dan pendukung PKI. Anggota-anggota yang berhasil di bina oleh PKI, sebagian diantaranya adalah mereka yang sejak semula sudah bersimpati dan berhaluan Marxisme-Leninisme oleh PKI disebut sebagai perwira-perwira yang berfikir maju. (Sekretariat Negara R.I, 1994 : 42-43).

#### B. Penyusupan PKI Ke dalam Jajaran Aparatur Negara serta ke Partai Politik dan Organisasi Massa

### 1. Penyusupan ke dalam Aparatur Negara

Dalam Kabinet IV yang terbentuk dalam bulan Nopember 1963, tokoh CC PKI Nyoto diangkat sebagai Menteri Negara yang diperbantukan pada presidium Kabinet, dengan tugas membantu Presiden Soekarno dan Dr. Soebandrio. Nyoto berhasil dikenal oleh Presiden Soekarno dan Nyoto dipercaya menyusun pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1945.

### 2. Penyusupan ke dalam Partai dan Organisasi Massa

Terhadap jajaran partai-partai yang berideologi Nasionalisme, PKI melakukan penyusupan ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo).

Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai yang memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum tahun 1955 menjadi sasaran penyusupan PKI secara intensif. Dalam Kongres PNI di Solo dalam tahun 1960-an, tokoh-tokoh tua PNI, seperti Wilopo, Suwirjo, Hadi, dan Sartono disingkirkan dari kepemimpinan partai. Sebaliknya Ir. Soerachman, seorang anggota Consetrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang merupakan organisasi Massa PKI dan menjadi Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Pertastuan Tani Indonesia (PETANI). Kemudian pada tanggal 04 Agustus 1965 Pimpinan PNI Ali Sastroamidjoyo dan Ir. Soerachman melakukan pemecatan terhadap tokoh-tokoh PNI tua seperti Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hadisubeno, M.H. Isnaeni, Usep Ranuwidjaja, Moh. Ahmad, Karim Duriat, Abadi, Mr. Hardi, Oemar Said dan Sutrisno.

PKI tidak berhasil melakukan penyusupan ke dalam partai-partai yang berdasarkan agama, walaupun demikian praktis PKI telah mampu menetralkan perlawanan dari partai-partai politik yang berdasarkan agama. Walaupun juga beraliran Marxisme, namun PKI mengambil sikap bermusuhan dengan partai Murba. Tokoh partai yang pertama kali dalam tahun 1964 mengumumkan dokumen rahasia PKI yang berisi rencana rahasia untuk melakukan perebutan kekuasaan negara. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa dokumen tersebut **palsu** dan dapat **merusak persatuan Nasakom** kemudian Presiden menerima sikap PKI dan meminta seluruh pimpinan partai politik menandatangani **Deklarasi Bogor** tanggal 12 Desember 1964 untuk meredakan kecurigaan yang berkembang antar partai. Dengan keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI No. 1/KOTI/1965 Tanggal 5 Januari 1965 Partai Murba dibekukan, baik Pimpinan Pusat, maupun Pimpinan Daerah, Cabang, Rantingnya dan organisasi massa serta lembaga-lembaga yang bernaung dibawah partai Murba. (**Sekretariat Negara R.I, 1994 : 46.**)

Sifat bahaya latent komunis adalah setelah pemberontakan G.30.S./PKI pada tahun 1965 digagalkan dan ditumpas, sisa-sisa kekuatan komunis masih banyak yang belum tertangkap dan terungkap.

Mereka yang dapat ditangkap, ditahan dan dihukum, adalah aktivis komunis yang bersifat terbuka, sedangkan aktivis-aktivis yang melakukan gerakan dibawah tanah yang dedikasi, loyalitas, militansi dan potensinya lebih tinggi serta identitasnya

sulit diketahui belum banyak yang dapat terungkap sehingga berhasil meloloskan diri.

Audit Cs adalah kader-kader komunis yang berhasil meloloskan diri dalam pemberontakan tahun 1948 yang gagal dan pada tahun 1965, kader-kader ini telah dapat mencetuskan pemberontakan kembali. Dengan demikian dapat diperhitungkan bahwa kader komunis yang berhasil lolos dalam pemberontakan tahun 1965, akan melanjutkan gerakan bawah tanah dengan menggunakan kegiatan yang tertutup dan terselubung.

Pola organisasi gerakan bawah tanah dapat diperkirakan berupa organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat fleksibel dan berusaha untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada dimasyarakat sambil menunggu datangnya kesempatan baik untuk memunculkan diri. ( Sekretariat Negara R.I, 1994 : 47).

## **B. Kondisi Politik umat Islam Indonesia**

Pada awal Orde baru, ada usaha dari kalangan umat Islam untuk kembali berperan dalam politik . Usaha ini dilandasi dengan asumsi bahwa sebagai umat yang mayoritas maka umat Islam akan selalu menjadi sasaran dari setiap kebijakan politik pemerintah yang berkuasa hal ini juga dilandasi umat Islam merupakan salah satu kelompok yang juga sangat berperan dalam hal ini melahirkan orde baru bersama ABRI dan mahasiswa / pelajar.

Usaha yang dilakukan umat Islam , pertama adalah mengusulkan rehabilitasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (*Masyumi*) pada 24 Oktober 1966. Masyumi merupakan partai politik Islam yang cukup berperan pada masa orde lama. Usaha kedua yang dilakukan adalah keinginan wakil Presiden M. Hatta tahun 1966-1967 untuk mendirikan Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (**GDII**) yang pada kelanjutannya akan dijadikan partai demokrasi Islam setelah berjalan tiga bulan. Namun usaha ini tidak dibenarkan oleh presiden.

Usaha lain dilakukan yang berasal dari kalangan Muhammadiyah atas inisiatif Mulyadi Djojo Martono dibicarakan juga kemungkinan mengaktifkan kembali partai Islam Indonesia (PII) yang pernah didirikan oleh pemimpin Muhammadiyah tahun 1958. Partai tersebut tak pernah dilarang tapi dizaman Jepang Non aktif. Tetapi gagasan ini seperti keinginan Masyumi dan M. Hatta juga tidak dapat diwujudkan (**Prisma, No. 5, 1988 : 43**).

Pada pembahasan kali ini umat Islam untuk merehabilitasi Masyumi. Pembahasan ini kami maksudkan karena begitu kerasnya keinginan dari umat Islam khususnya dari kalangan Masyumi sendiri- untuk berdirinya kembali Masyumi sebagai partai Islam pada masa *Orde Baru*. Berdirinya Masyumi ini juga dengan harapan agar partai Islam ini dapat memainkan perannya kembali sebagai penyalur aspirasi umat. Ternyata keinginan untuk merehabilitasi Masyumi yang telah

dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960-an tidak diberikan oleh pemerintah Orde Baru.

Khawatiran untuk berdirinya Masyumi ini banyak berasal dari kalangan militer, khususnya Angkatan Darat. Masyumi berkembang sebagai kekuatan yang anti Komunis (PKI), sifat fanatik yang ditunjukkan oleh masyumi menyebabkan militer mempunyai kecurigaan dan kekhawatiran yang sangat dalamnya terhadap Masyumi. Walaupun ideologi politik mereka sangat saling bertentangan.( **Alfian, 1980 : 37** ).

Jika semula umat Islam bersama ABRI dan kekuatan lain berhasil menggagalkan pemberontakan G 30 S/PKI, selanjutnya antara keduanya berbeda pendapat dalam masalah merehabilitasi Masyumi. Tuntutan umat Islam terhadap rehabilitasi Masyumi merupakan bagian dari gerakan politik PKI. Selain itu umat Islam dan pemerintah telah berhasil menumpas pemberontakan PKI. Untuk itu Umat Islam beranggapan bahwa rehabilitasi Masyumi merupakan konsekwensi logis sikap pemerintah terhadap bubarnya PKI itu sendiri. ( **Abd. Munir Mulkhan, 1992 : 32**).

Ternyata logika tersebut tidak berlaku dikalangan pemerintah khususnya ABRI. Larangan pemerintah ini dilandasi oleh pemikiran kekhawatiran sikap oposan dan pembangkang dari Masyumi yang dapat mengakibatkan berbagai konflik politik. Khususnya mengenai dasar Negara yang dapat merugikan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Sebab menurut pemerintah Orde Baru

Orde Baru walaupun berbeda dengan orde lama. Masyumi sudah terlanjur menentang pemerintah yang sah pada waktu itu. Diantara alasan yang dikeluarkan pemerintah adalah bahwa Masyumi (pemimpin-pemimpinnya) turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan. Dan partai ini tidak dengan resmi menindak anggotanya yang terlibat ( Sulastomo, 1990 :74.).

Pendapat lain mengatakan mengapa Masyumi tidak diberi ijin untuk merehabilitasi, setelah dibubarkan oleh keterlibatan Masyumi terhadap pemberontakan pada zaman Soekarno, juga disebabkan karena pendidikan tokoh-tokoh Masyumi. Banyak tokoh Masyumi yang latar belakang pendidikannya dari Belanda dan menganut Demokrasi barat yang liberal. Bahkan oleh lawan poilitiknya, Masyumi sering dijuluki kampium liberalisme " (Nurcholis Madjid, 1983 : 18 ).

Sebenarnya banyak sekali dukungan yang diberikan oleh organisasi Islam yang dikenal dengan anggota istimewa Masyumi untuk mendukung rehabilitasi Masyumi . Dan jumlahnya tiap hari bertambah banyak. Dan semakin banyak lagi setelah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut mendukung adanya rehabilitasi Masyumi. Dulunya HMI tidak menyokong rehabilitasi, tetapi didalam kongresnya di solo diputuskan menyokong rehabilitasi. Dan yang terakhir ialah sokongan dari GASBINDO. ( M. Natsir dan Prawoto Mangkusumo, 1388 : 48).

Usaha-usaha dari organisasi-organisasi Islam ini ternyata mengalami kegagalan. Masalah ini semakin jelas setelah Jendral Soeharto dengan suratnya tanggal 6 Januari kepada Prawoto Mangunkusumo (Ketua Umum Masyumi sewaktu dibubarkan) mengenai keberatan merehabilitasi Masyumi. Atas alasan-alasan yuridis,

ketatanegaraan dan psikologis, pemerintah pada umumnya dan ABRI pada khususnya tidak dapat menerima rehabilitasi Masyumi. ( Sulastomo, 1990 : 75).

Prawoto sendiri, mengenai larangan rehabilitasi Masyumi berpendapat bahwa halangan yang sangat besar terhadap munculnya masyumi sebagai partai disebabkan adanya Masyumi phobi, karena ada sesuatu yang dimitoskan yaitu yang mengatakan bahwa Masyumi anti Pancasila. bahwa Masyumi akan membawa revolusi ke kanan.( M. Natsir dan Prawoto Mangkusumo, 1388 :36).

Larangan pemerintah untuk merehabilitasi Masyumi tidak hanya sampai disitu saja. Keadaan ini berlanjut ketika pengganti Masyumi didirikan. Yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Ternyata bekas tokoh Masyumi dilarang untuk duduk menjadi ketua Parmusi oleh sebagian umat Islam partai itu sebagai pengganti Masyumi, tapi buat pemerintah sebaliknya. Parmusi menjadi partai yang tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi.

Untuk itu , setelah Parmusi didirikan tanggal 7 April 1967, pemerintah -presiden - dengan surat keputusannya menunjuk H. Djarnawi Hadikusumo sebagai

ketua Umum dan Lukman Harun sebagai Sekretaris Jendral. Kepemimpinan dua orang ini dianggap sementara dan akan disempurnakan pada Kongres yang berlangsung di Malang tahun 1968. Pada kongres ini yang menjadi calon kuat untuk menjadi Ketua Umum adalah Muhammad Roem, bekas tokoh Masyumi. Namun pemerintah tidak menyetujui bekas tokoh Masyumi ini untuk menjadi Ketua Umum di Parmusi. Dengan kondisi ini muncul konflik dalam tubuh Parmusi sendiri. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap keputusan pemerintah. Ketika terjadi perpecahan ini, J. Naro dan Imran Kadir mengecam kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun yang dianggap tidak akrab dengan pemerintah. J. Naro dan Imran Kadir mengangkat dirinya sebagai Ketua dan Sekretaris menggantikan Djarnawi dan Lukman Harun dengan cara merebut kekuasaan kepemimpinan kedua orang tersebut. Tanggal 19 oktober 1970, Djarnawi memecat J. Naro dan Imran Kadir karena dianggap melanggar organisasi ( Prisma, No. 5, 1988 : 44 ).

Dengan kasus ini, konflik internal partai semakin nampak. Yang jelas konflik ini salah satunya disebabkan campur tangan pemerintah pada awal berdirinya partai. Keadaan tersebut menyebabkan presiden Soeharto turun tangan dan menggantikan pimpinan lama Parmusi. Kemudian diangkat H. M. S. Mintaredja dan Sulastomo menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jendral ( Sekjen ).

Penolakan bekas tokoh Masyumi untuk aktif di Parmusi ini merupakan bibit konflik baru antara umat Islam dengan Orde baru. penolakan pemerintah terhadap

tampilnya tokoh-tokoh Masyumi ini didasarkan pada alasan keterlibatan mereka dalam gerakan PRRI. Akan tetapi setelah umat Islam menampilkan tokoh yang dianggap bersih dari PRRI ternyata pemerintah tetap menolak. Maka alasan pemerintah tersebut menjadi gugur atau tidak mendasar. (Abd. Munir Mulkhan, 1992 : 32 ).

### **C. Gerakan Partai Politik Islam di Indonesia**

Suatu fakta menyatakan kepada kita bahwa bangsa Indonesia adalah proses Islamisasi dalam ideologi politik belumlah didukung oleh hasil penemuan bebas tersebut, bukankah pula pemilu tahun 1955 itu diselenggarakan oleh sebuah kabinet-kabinet pimpinan Partai Islam.

Untuk lebih memahami sosok Islam di Indonesia dalam strategi perjuangan politik perlu kita menengok kebelakang mengenai pengalaman umat Islam pada waktu jaman Jepang . Sudah sama kita ketahui bahwa kevakuman kekuasaan yang bakal ditinggalkan oleh Jepang manakalah ia dilakukan sekutu akan membawa perubahan yang sangat mendasar bagi status Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. ( Prisma , 1984: 68).

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah pembela sistem politik demokrasi terpimpin, sementara memang ada kelompok kecil yang ingin bahkan telah menempuh jalan pintas untuk mencapai tujuan politiknya. Kelompok terakhir bisa di

sebut "Golongan Sempalan" oleh sebagian kalangan, artinya adalah golongan yang melakukan penyimpangan dari golongan besar umat Islam Indonesia. Kasus-kasus pemberontakan dengan nama Islam di berbagai daerah di Indonesia pada masa lalu adalah bagian dari penyimpangan dari pola perjuangan lewat konstitusi, yaitu usaha untuk menjadikan konstitusi Negara Republik Indonesia bercorak Islam. Dalam pengalaman Indonesia perjuangan konstitusional itu terjadi pertama pada bulan-bulan menjelang kemerdekaan, kedua setelah pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955. ( Prisma , 1984 : 70 ).

Masa pasca kemerdekaan di pandang dari hubungan Islam dan politik, dapat di bagi dalam beberapa bagian, umumnya bagian pertama zaman revolusi dapat segera di tinggalkan dengan mengatakan bahwa peranan umat Islam Indonesia amat besar, baik dalam pertempuran, maupun dalam pertarungan politik dalam negeri ataupun diplomasi. Dan dalam perwakilan komite Nasional Indonesia, kalangan Islam diwakili dalam jumlah yang cukup besar. Dalam kabinet, yang silih berganti menteri-menteri dari partai Islam (Masyumi ) ketika didukung Oleh NU senantiasa duduk, ketika Amir Syarifuddin dari partai sosialis tidak berhasil mengajak Masyumi duduk dalam kabinet, kalangan Islam dirasakan tidak mungkin di tinggalkan sama sekali sehingga dihidupkan kembali partai serikat Islam Indonesia kemudian Amir Syarifuddin terlibat dalam pemberontakan Komunis di Madiun pada tahun 1948. ( Prisma, 1979 : 9).

Kemudian tanggal 5 Juli 1959, UUD '45 di dekritkan sehingga kepala Negara pun resmi menjadi kepala pemerintahan. (Deliar Noer, 1987 : 35).

Kemudian konsepsi Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin yang dilontarkan pada tahun 1957 terus dikembangkan dan senantiasa disesuaikan dengan keadaan atau dengan keperluan tertentu dari Soekarno untuk mencapai tujuan sesaat. Sikap yang pertama kali timbul di kalangan partai-partai Islam adalah menentang konsepsi tersebut. Tetapi setelah Dekrit 5 Juli 1959 suara partai-partai Islam tersebut terpecah menjadi dua kelompok yang terdiri dari NU, PERTI dan PSII membela konsepsi Soekarno tapi Masyumi menolak dengan tegas sehingga berakhir dengan dibubarkannya partai ini.

Namun di antara partai-partai Islam yang turut serta dalam sistem politik yang baru diciptakan oleh Soekarno, NU harus dicatat sebagai yang terpenting untuk dibicarakan karena partai inilah yang muncul sebagai partai Islam terbesar setelah Masyumi menghilang. Sedangkan dua partai Islam lainnya sekalipun sangat berarti menurut ukuran mereka, pengaruh politiknya relatif terbatas sebab wakil-wakilnya di parlemen hanyalah seperempat jumlah wakil NU ( A.Syafi'i Ma'arif, 1988 : 3).

#### **D. Gerakan Pemuda dan Aksi-aksi Mahasiswa terhadap Komunis di Indonesia**

Resiko aksi-aksi yang telah dilakukan oleh pemuda Indonesia maka Imbas dari peta politik yang semakin tidak menentu akibat berbagai macam pertentangan di mana peran MPR/DPR-GR tidak lagi kondusif dalam menyuarakan tuntutan generasi muda maka secara praktis KAMI menjadi wadah tunggal yang permanen secara politis, organisatoris dan realistik. Wadah berhimpunnya seluruh kekuatan Mahasiswa Indonesia dengan format gerakan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dianggap sangat representatif bagi penyaluran aspirasi generasi muda.

Kelahiran KAMI ditengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat karena akibat petualangan PKI dan pemimpin gadungan negara tampil ke depan untuk menyuarakan hati nurani rakyat, laksana lahirnya samson untuk memerangi angkara murka dan kezaliman yang merajalela. Mahasiswa yang mempunyai tugas sejarah, studi dan mengabdikan untuk negara, berorientasi kepada perjuangan rakyat. Kepentingan pribadi seperti kuliah di tinggalkan sementara demi mengemban Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) (Sitompul, 1976a : 75)

Sebelum tahun '66, kita melihat beberapa Generasi Muda Cendekiawan (GMC) yang Non-Komunis merisaukan ekonomi Rakyat yang bergumul dengan berbagai penderitaan, mereka menghawatirkan tampilnya kepemimpinan negara otoriter, dimana PKI berhasil melakukan manipulasi politik dan meraih posisi

Starategis untuk mengambil alih kendali kekuasaan pemerintahan negara demi untuk terwujudnya pemerintahan komunis. Ketika itu PKI berusaha menciptakan suatu kondisi revolusioner hingga pada puncaknya aktivitasnya yakni melakukan kup yang di kenal sebagai gerakan 30 september 1965. Namun apa yang mereka inginkan tidak berhasil berkat kegigihan dan kekompakan kekuatan aksi yang tergabung dalam Kappi/Kami/Kasi dan terkonsentrasi menjadi kekuatan, guna untuk melancarkan demonstrasi besar-besaran, menggerakkan seluruh dan bersama Rakyat melancarkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) (AM Saifuddin, 1995 : 70).

Dalam lembaran sejarah perjuangan KAMI ditandai dengan adanya aksi yang menggemparkan di halaman Universitas Indonesia Salemba Jakarta, pada tanggal 10 Januari 1966, KAMI mengumandangkan suara "hati nurani rakyat" ( HANURI) dalam bentuk Tri Tuntutan Rakyat disingkat "**TRITURA** " yang berisi

1. Bubarkan PKI
2. Retooling Kabinet
3. Turunkan harga.

Peristiwa bersejarah ini terkenal sebagai " Hari Kebangkitan Angkatan '66 dan Orde Baru "

Timbulnya "orde baru" juga dikenal sebagai masa kebangkitan angkatan "'66" yang ditandai oleh suatu kejujuran baru dan keterbukaan. Sebulan setelah demonstrasi kampus, samberi mengabaikan tuntutan-tuntutan KAMI, Presiden

Soekarno malahan membuat kabinet baru dengan membawa beberapa orang di kenal sebagai simpatisan komunis yang dicurigai terlibat didalam kup yang gagal itu. Rangsangan Presiden Soekarno ini pemancing protes amarah bagi kalangan mahasiswa yang didukung oleh angkatan darat. Sekali lagi KAMI. Dipimpin oleh HMI , untuk melancarkan demonstrasi besar-besaran. Kali ini bergerak dari kampus langsung menuju istana Presiden. Disini mengulangi tuntutan nya agar Presiden membubarkan partai komunis. ( Victor Tanja, 1991 : 101).

Akhirnya berkat gencaran perjuangan Generasi Muda (GM) beserta kekuatan-kekuatan lainnya bagi tegaknya kebenaran, keadilan dan Demokrasi. PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan Tritura .

Sementara aksi pengganyangan G 30 S/PKI dan tuntutan pembubaran PKI dan segala ormasnya terus berjalan, Bung Karno belum juga memperlihatkan tanda-tanda PKI akan dibubarkan. Kondisi kehidupan nasional pun bertambah kacau akibat inflasi ekonomi yang melonjak sampai 650% dan harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok, melompat tinggi. Sementara itu Waperdam III Chaerul Saleh yang bertanggung jawab dibidang ekonomi tidak berbuat apa-apa. Partai-partai politik tampak tidak berdaya. (Soemarno Dipodisastro, 1995 : 14 ).

Keterlibatan Mahasiswa-Pelajar yang tergabung didalam dua organisasi besar *Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)*, *Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI)* dalam menumpas PKI dapat pula dipandang suatu

kebangkitan Pelajar Mahasiswa untuk menembus kekalahannya terhadap Kesatuan-kesatuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa *underbouw* PKI yang sangat dominan terutama di tahun-tahun 1960-an sampai pecahnya G 30/S PKI. Pemuda-Pelajar -Mahasiswa yang saling bahu membahu dengan tentara bersama umat Islam inilah yang mempunyai tuntutan keras untuk mencari siapa sebenarnya dalang kudeta yang gagal itu, adalah terlalu pagi menyebut Soekarno sebagai dalangnya karena belum ada bukti yang cukup tapi berbagai gejala yang bisa dibaca menunjukkan bahwa menjelang kudeta mengerikan itu terjadi Soekarno tampak memberi angin sehingga memungkinkan PKI bisa leluasa berbuat untuk menjalankan seluruh programnya.

Menurut Fryer dan Jackson dengan tegas berpendapat bahwa "lebih banyak bukti yang memberikan petunjuk kuat bahwa Sukarno mengetahui adanya suatu pukulan yang sifatnya mendahului... yang sedang di rencanakan oleh PKI dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya ... Sikap Soekarno sesudahnya juga memberikan petunjuk kuat bahwa ia secara diam-diam menyetujui di lenyapkannya para Jenderal itu".

Pemuda-Pelajar-Mahasiswa yang di kenal gigih dalam menumpas PKI seperti halnya ummat Islam berjuang tanpa pretensi atau pamrih apapun. Mereka terpanggil karena rasa tanggung jawab moral mereka akan masa depan bangsanya. Di Kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta serta beberapa kota lainnya

militansi gerakan mereka cukup mengagumkan. Yel-yel ganyang PKI dan antek-anteknya hampir setiap pagi dapat didengar di jalan-jalan utama kota-kota besar. ( **Rusli Karim, 1993 : 154-155** ).